

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi tonggak baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Desa yang sebelumnya tidak dikenal di dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan tentang tata pemerintahan di Indonesia, berubah menjadi unit pemerintahan terkecil yang mempunyai legalitas dan legitimasi formal sebagaimana halnya pemerintah kabupaten/kota atau provinsi yang berada di atasnya. Hal itu berimplikasi pada kemandirian desa dalam menetapkan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan di daerahnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 UU Desa. Pasal 78 ayat (2) UU Desa menyebutkan bahwa “Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”.

Rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut sangat diperlukan untuk mengatur agar kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada desa itu dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Dengan berlakunya program pemerintah dalam rangka memberikan dana bantuan Anggaran Dana Desa (ADD) kepada tiap-tiap desa melalui perangkat desa membuat desa semakin berkembang dalam meningkatkan pembangunan desa.

Berdasarkan alokasi dana desa kabupaten atau kota tahun 2019 pemerintah telah menganggarkan 70 Trilyun Rupiah. Dana tersebut akan dibagikan kepada 74.953 desa yang menerima dana desa. Maksud dari pemberian ADD ini adalah sebagai stimulant yang berupa bantuan untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu yang mendapatkan alokasi dana desa adalah Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Desa Lerep merupakan salah satu desa wisata favorit di Jawa Tengah. Desa ini memiliki alam yang mempesona dengan pemandangan Gunung Ungaran. Di desa ini pula terdapat Dusun Indrokilo yang kerap menjadi tujuan para wisatawan mancanegara.

Di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terdapat daerah rawan bencana yaitu daerah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti terjadinya tanah longsor. Daerah gerakan tanah atau longsor merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona

tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor/ bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di wilayah Desa Lerep penyebaran kawasan ini tersebar di Dusun Indrokilo, Dusun Lerep dan Dusun Soka.

Bencana tanah longsor pernah beberapa kali terjadi di Desa Lerep Kabupaten Semarang. Seperti peristiwa yang terjadi di Dusun Indrokilo pada 15 Februari 2017. Sedikitnya enam rumah di dua lokasi di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Lokasi longsor pertama berada di Dusun Indrokilo RT 03 RW 01 yang setidaknya ada dua rumah rusak akibat bencana tersebut. Lokasi kedua berada di sebuah perumahan di wilayah RT 05 RW 03 Desa Lerep. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat Empat rumah rusak terdampak akibat bencana tersebut. Selain itu akses jalan di RT 02 RW 02 Desa Lerep juga sempat tertutup tanah longsor dari bukit di atasnya. (Kompas.com, 16/02/2017)

Gambar 1.1
Peristiwa Bencana Longsor Desa Lerep



Sumber: Kompas.com, 16/02/2017

Untuk menanggulangi terjadinya bencana tersebut maka perlu adanya pembangunan talud penahan tanah. Talud merupakan dinding

penahan tanah yang dirancang untuk menahan tanah ke lereng yang tidak secara alami dijaga (biasanya lereng curam, hampir vertikal atau vertikal). Hal itu digunakan untuk mengikat tanah di antara dua ketinggian yang berbeda, sering kali terjadi di daerah yang memiliki lereng dengan bentuk yang tidak diinginkan atau di daerah dimana lanskap perlu dibentuk secara parah dan direkayasa untuk tujuan yang lebih spesifik seperti pertanian di lereng bukit atau jalan layang (Wikipedia,2020). Talud berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami dan mencegah terjadinya keruntuhan tanah yang miring atau lereng yang kemantapannya tidak dapat dijamin oleh lereng tanah itu sendiri.

Dalam mengelola pembangunan desa setiap pemerintah desa mengupayakan peningkatan terhadap kinerja pembangunan sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam menunjang peningkatan kinerja pembangunan di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, perlu ditunjang dengan perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi yang disusun oleh pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan desa, dimana pemerintah juga melibatkan sektor swasta dan kelompok masyarakat didalamnya, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan visi dan misi daerah yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam membuat suatu perencanaan pembangunan suatu desa, khususnya pembangunan talud penahan longsor, salah satu unsur penting yang harus terlibat didalamnya adalah masyarakat. Oleh sebab itu salah satu indikator yang mempengaruhi berhasil tidaknya visi dan misi suatu pembangunan daerah adalah partisipasi masyarakat. Peran partisipasi masyarakat secara langsung sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa keterlibatan masyarakat dan pihak swasta yang membantu pemerintah dalam menyusun dan melakukan perencanaan pembangunan desa, maka visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya akan sulit tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Hal itu sesuai dengan pasal 18 Ayat (7) dan pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama.

Untuk melihat apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep terlaksana dengan baik atau tidak, maka pemerintah daerah melaksanakan penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Program ini merupakan suatu proses pelibatan masyarakat dalam memberikan usulan, saran, dan pendapat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan pada sektor ataupun bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta prioritas pembangunan daerah.

Pada perencanaan pembangunan Talud penahan longsor di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan pemanfaatan penerimaan dana desa diharapkan dapat menanggulangi terjadinya bencana tanah longsor yang kerap terjadi di desa tersebut. Alasan memilih lokasi tersebut karena memiliki potensi sosial yang besar seperti kepedulian, musyawarah, gotong-royong, keswadayaan dan lain- lain yang cukup baik untuk membenahi permasalahan infrastruktur pada lingkungan Desa Lerep dengan tujuan untuk melancarkan akses ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain. Hal ini juga didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dengan prosentase kehadiran hingga 80% dalam kegiatan musrenbang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Talud Penahan Longsor (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Lerep Kabupaten Semarang).

1. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan partisipatif Pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?

2. Apa faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat pada proyek pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep Kabupaten Semarang?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang pada bagian sebelumnya, dapat ditetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses perencanaan partisipatif pada proyek pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep Kabupaten Semarang yang berbasis partisipasi masyarakat.
2. Menemukan berbagai faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat pada proyek pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep Kabupaten Semarang

1. 4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat Desa Lerep sesuai dengan mekanisme proses kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa. Dalam masyarakat demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) masyarakat Desa Lerep untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada

umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahannya mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.

3. Partisipasi masyarakat Desa Lerep dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses musrembang. Dalam hal ini tergantung sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku bagi suatu Desa. Ada kalanya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat mobilisasi daripada partisipasi.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat Desa Lerep untuk dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Unit Pemerintahan Desa Lerep

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai masukan kepada unit pemerintahan Desa Lerep mengenai pendekatan atau metode bagaimana membuat perencanaan partisipatif yang baik, sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat optimal secara menyeluruh ditinjau perspektif

pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan perspektif tersebut maka hasil dan manfaat pembangunan tidak dapat dianggap selesai dengan telah dibangunnya infrastruktur fisik talud penahan longsor, namun manfaat dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangunan talud tersebut juga dipertimbangkan di dalam perencanaan.

2. Warga Terdampak Longsor dan Masyarakat yang Lebih Luas

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi warga terdampak longsor dan anggota masyarakat lain di desa Lerep sebagai pengetahuan yang dapat membuka wawasan, membangkitkan kesadaran, dan meningkatkan ketrampilan dalam berpartisipasi secara efektif di dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan pengetahuan itu warga diharapkan mampu menentukan isu strategis, prioritas dan mengambil keputusan di dalam proses perencanaan.

3. Peneliti dan Para Peneliti Lainnya

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi peneliti dan/atau peneliti lainnya sebagai bukti empiris tentang penerapan metode partisipatif pada Desa Lerep Kabupaten Semarang dan hasil penelitian ini bisa dipergunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan bacaan sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan.

1. 5. Kerangka Berpikir Teoritis

Bagian ini merupakan unsur penting dalam penelitian, sebab fenomena yang sedang diamati dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan sebagai upaya mengkonstruksi pemahaman dasar atas fenomena tersebut. Kerangka Pemikiran teoritis ini terdiri dari uraian sistematis dan terstruktur terkait hasil penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka atau kajian teori yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini.

1.5.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
Afwah Ulya	Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang	2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU, yaitu:(1) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, wujud nyata dalam tahap ini dapat dibuktikan melalui masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi dan waktu dalam pelaksanaan program pada musyawarah atau rapat; (2) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, wujud nyata dalam tahap ini dapat dibuktikan melalui sumbangan pemikiran, sumbangan materi dan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program KOTAKU; (3) partisipasi masyarakat dalam evaluasi, wujud nyata dalam tahap ini dibuktikan melalui masyarakat khususnya Tim Inti Perencana Partisipatif mengevaluasi dari hasil pembangunan serta

			<p>mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program KOTAKU; (4) partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil, wujud nyata dalam tahap ini dapat dibuktikan dengan manfaat yang diambil setelah pelaksanaan program KOTAKU seperti berkurangnya debit air pada saat hujan. Setelah menganalisa data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa faktor pendukungnya adalah Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program. Sedangkan faktor penghambat dalam partisipasi ini adalah masyarakat masih kurang sadar akan berpartisipasi dan kebiasaan masyarakat akan mengharapkan imbalan dalam melakukan serangkaian proses Program KOTAKU.</p>
Sitti Nurfatih Rahman	Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa	2016	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa diketahui dengan menggunakan 3 pertimbangan yaitu pengumpulan informasi permasalahan pembangunan, penyaluran aspirasi masyarakat, dan diversivitas pengambilan keputusan. Pengumpulan informasi permasalahan pembangunan dilihat dari kehadiran dan keaktifan masyarakat pada pelaksanaan musrenbang dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap pembangunan. Penyaluran aspirasi masyarakat dilihat dari transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan. Sedangkan diversivitas pengambilan keputusan dilihat dari perbedaan keputusan yang diambil pemerintah daerah untuk setiap</p>

			wilayah di Kecamatan Tinggimoncong sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.
Ashari, Wahyunadi, dan Hailudin	Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)	2015	Penelitian ini memberikan hasil bahwa Tingkat serapan perencanaan partisipatif di Kabupaten Lombok Utara adalah sangat baik, yaitu sebesar 50,36% dari jumlah total usulan perencanaan yang diajukan oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat serapan perencanaan partisipatif antara lain: (1) Ketersediaan anggaran; (2) Kepentingan politik; (3) Kualitas usulan; dan (4) Urgensi kepentingan.

Dari penelitian-penelitian diatas terdapat kesamaan pada penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang perencanaan partisipatif pembangunan, meskipun demikian penelitian tentang perencanaan partisipatif pembangunan pada studi kasus pembangunan talud penahan longsor masih layak untuk diteliti karena sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian perencanaan partisipatif pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Penelitian ini akan membahas tentang perencanaan partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan talud penahan longsor serta mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung perencanaan partisipatif pembangunan talud di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

1.5.2. Perencanaan Pembangunan

A. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan terdiri dari dua kata yang berbeda, yakni perencanaan dan pembangunan. Perencanaan adalah proses kontinyu yang terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya dengan sasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada hakikatnya, perencanaan adalah upaya untuk menjadikan kegiatan pembangunan menjadi terarah dan dapat dikontrol, serta dievaluasi. Beberapa pendapat mengenai perencanaan, antara lain pendapat Sondang P Siagian (1983) yang mengatakan bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara itu menurut Pariata Westra (1982) dalam bukunya *Ensklopedia Administrasi*, mengartikan perencanaan sebagai aktivitas pokok manajemen yang menggambarkan perihal aktivitas kegiatan beserta cara mengerjakannya. Perencanaan merupakan bagian penting untuk kontrol dan evaluasi atas program yang dijalankan. Nilai penting dari perencanaan dikemukakan oleh Bintaro (1987), yaitu:

- 1.** Perencanaan menjadi pengarah kegiatan atau pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- 2.** Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui.

Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*)
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Nilai penting lainnya dari adanya perencanaan selain yang dikemukakan di atas adalah adanya pengalokasian sumberdaya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang dilakukan. Selain itu, dengan adanya perencanaan maka pendefinisian tujuan serta cara pencapaiannya bisa dilakukan (Diana Conyers dan Peten Hits, 1984).

Tipologi Pendekatan Perencanaan

Amien (2005) menjelaskan beberapa model pendekatan perencanaan yakni:

- Model rasional komprehensif

Model ini menganut doktrin determinisme dan reduksionisme. Pendekatan ini hanya sesuai untuk kondisi di mana sasaran pembangunan terdefinisi dengan baik, serta kondisi lingkungan strategis dapat diprediksi dengan benar. Misalnya penggunaan model *input-output* dalam perencanaan. Terdapat beberapa bidang yang dibagi ke dalam beberapa sektor. Kemudian sektor kembali dibagi ke dalam subsektor dan seterusnya, sehingga diperoleh masalah pembangunan yang terdefinisi dengan jelas. Pada umumnya model ini memiliki kelemahan yang terletak pada asumsinya yang tidak dinamis. Analisis yang dibuat diambil berdasarkan data masa lalu, serta mengasumsikan bahwa data yang diperoleh dapat digunakan untuk memproyeksikan masa depan. Selain itu, kelemahan yang dimiliki dari model ini adalah asumsinya bahwa kondisi dan pengaruh lingkungan strategis dapat dikendalikan atau bahkan diabaikan. Asumsi ini diperuntukkan bagi wilayah perencanaan yang relatif kecil dan terisolasi.

- Model Partisipatif

Model ini menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Setidaknya terdapat tiga pertimbangan, yaitu:

- a) Pengumpulan informasi, kegiatan ini dilakukan agar perencanaan pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil dengan kata lain mengurangi

ketidakpastian. Objek yang sama akan memberikan persepsi yang berbeda apabila dilihat oleh dua atau lebih pengamat dengan cara pandang yang berbeda, walaupun dilakukan serentak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi (kebenaran), diperlukan keterlibatan sebanyak mungkin pengamat.

- b) Menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi Masyarakat diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan kecil dalam suatu sistem pada tatanan yang nantinya akan menyebabkan rusaknya sistem secara keseluruhan. Penyaluran aspirasi masyarakat bukan hanya untuk sekedar memberi “perasaan” namun dengan demikian akan memicu masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi.
- c) Diversivitas proses pengambilan keputusan. Diversivitas akan memperkuat tatanan secara keseluruhan, karena gejala-gejala dapat dilokalisasi pada bagian-bagian tatanan, sehingga tatanan secara keseluruhan akan tetap stabil.
- Model Adaptif
Perencanaan adaptif mengintegrasikan keluwesan (fleksibilitas) dan kemampuan responsive (*responsiveness*) pada level perencanaan dan pengambilan keputusan. Model ini senantiasa melakukan modifikasi terhadap rencana pembangunannya agar senantiasa sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Setelah memahami makna perencanaan, perlu juga mengerti pula yang dimaksud pembangunan. Menurut Sondang P Siagian (1983) pembangunan yaitu : “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pembangunan dapat pula diartikan sebagai upaya yang dilakukan demi mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk kearah yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Permasalahan dan potensi yang ada
- b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai
- c. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
- d. Penerjemahan rencanan kedalam bentuk program yang nyata
- e. Jangka waktu pencapaian tujuan

Pengertian perencanaan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah pengertian perencanaan pembangunan secara umum. Pada konteks penelitian ini, perencanaan pembangunan yang dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa, khususnya Desa Lerep Kabupaten Semarang. Perencanaan pembangunan desa dalam arti sempit adalah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Desa.

B. Perencanaan Pembangunan di Desa

Perencanaan Pembangunan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksud adalah segala upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimaksud, antara lain: penetapan dan penegasan batas Desa; pendataan Desa; penyusunan tata ruang Desa; penyelenggaraan musyawarah Desa; pengelolaan informasi Desa; penyelenggaraan perencanaan Desa;

penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; penyelenggaraan kerjasama antar Desa; pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

1.5.3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah suatu konsep yang luas dengan beragam konteks, penerapan dan definisi (Moggani, 2001; O'Mara-Eves,, 2013). Bagi sebagian kalangan partisipasi dimaknai sebagai “prinsip dalam berinteraksi sosial”, sementara kalangan lain menganggapnya sebagai “praktik” di dalam berhubungan dan berinteraksi sosial (O'Mara-Eves,, 2013). Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat di dalam suatu proyek untuk menyelesaikan problem/masalah tertentu (Wasilwa C., 2015). Pada konteks penelitian ini, partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan warga Desa Lerep di dalam proses perencanaan dan pembangunan talud penahan longsor.

Partisipasi melibatkan serangkaian kegiatan seperti: berbagi informasi, konsultasi, berdebat atau berargumentasi, dan pemberdayaan. Warga setempat dapat berpartisipasi selama proses penilaian kebutuhan, perencanaan, mobilisasi sumber daya, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi proyek. Pada praktiknya, tidak setiap warga dapat berpartisipasi

karena di dalam stratifikasi sosial selalu terdapat kelompok elit yang memiliki akses dan pengaruh lebih besar di dalam pengambilan keputusan daripada sebagian besar anggota masyarakat marjinal. Partisipasi masyarakat harus dimaknai dan dirasakan sebagai keterlibatan di dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan.

Di dalam perspektif teori partisipasi masyarakat, terdapat dua aspek yang saling berhubungan dan tergantung satu sama lain, yaitu : (1) pemberdayaan (*empowerment*); dan (2) pembangunan kapasitas (*capacity building*). Howard Graham et al. (2017), menegaskan bahwa partisipasi harus memberikan kapasitas kepada warga lokal untuk ikut terlibat dan menentukan apa yang dapat dikerjakan serta bagaimana melakukannya (Howard & Graham et al., 2017 dalam Iddi & Nuhu, 2018). Prinsip dasar partisipasi adalah memaksimalkan peluang untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam perumusan kebijakan atau perencanaan (Zittel T. & Fuchs D., 2007 dalam Iddi & Nuhu, 2018). Partisipasi akan membuat lingkungan menjadi lebih baik apabila warga yang terdampak oleh perubahan dilibatkan secara aktif di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi proyek (Sanof H., 2000 dalam Iddi & Nuhu, 2018).

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat supaya manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Partisipasi berasal dari

bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004). Menurut Mubyanto (1997), partisipasi diartikan sebagai sebuah kondisi di mana pembuat keputusan memberi ruang kepada masyarakat ikut serta terlibat pada proses pembangunan dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Partisipasi merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan dilingkungannya (Arimbi, 1993). Selaras dengan pernyataan Arimbi, Arif Zainuddin (2018) menjelaskan partisipasi sebagai Partisipasi diartikan sebagai “keikutsertaan”, “keterlibatan” dan “pembagian peran” di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Berdasarkan pengertian di atas, pada intinya partisipasi adalah mengikutsertakan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam tahapan pembangunan. Wujud keikutsertaannya bisa berupa usulan, kritikan, maupun dalam bentuk barang dan jasa. Partisipasi menjadi bagian dari proses demokratisasi pembangunan wilayah, termasuk pembangunan desa.

Jenis-jenis Partisipasi

Terdapat beberapa jenis partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Berdasarkan cara keterlibatan masyarakat, partisipasi dibagi menjadi dua yaitu (Sugiyah, 2010):

a. Partisipasi Langsung.

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi yang merepresentasikan keterwakilan dirinya. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi Tidak Langsung.

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain dalam wujud keterwakilan.

Pendapat lain disampaikan oleh Sumaryadi (2010) yang menyatakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain.
3. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Bentuk Partisipasi

Partisipasi menurut Efendi, bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat

atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi (2005), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi fisik dan partisipasi non fisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan seperti usaha-usaha pembangunan rumah, pembangunan jalan, membangun gedung-gedung untuk masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Dusseldorp dalam buku pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.

4. Menggerakkan sumber daya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. (Mardikanto, 2012)

Menurut Ndraha (2008) bentuk partisipasi meliputi:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan social.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mematuhi, melaksanakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tahapan Partisipasi

Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011) membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada saat perencanaan suatu kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan. Berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Dalam redaksi yang lain, yang dipaparkan oleh Yadav, dikutip oleh Totok Mardikanto. Tahapan-tahapan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Partisipasi dalam mengambil keputusan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi program dan proyek-proyek pembangunan.
4. Partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Menurut Dwiningrum (2011) Faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat adalah:

1. Aspek-aspek tipologis
2. Sifat malas, tidak mau tau dan juga apatis terhadap perubahan di lingkungan masyarakat
3. Geografis (Pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
4. Demografis (Jumlah penduduk)
5. Ekonomi (Desa miskin atau tertinggal)

Ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi:

- a. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan wadah untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna tempat saja tetapi juga forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa

(Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrenbangdes menjadi tidak mawadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Melemahnya modal sosial

Modal sosial merupakan serangkaian jaringan atau organisasi dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil dan lain sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Dwiningrum (2011) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program, sifat faktor-faktor ini bisa mendukung program yang sukses, tetapi ada juga sifat dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya, faktor usia, yang terbatas properti, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Angell mengatakan bahwa partisipasi berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan masyarakat yang ada. Orang dari kelompok usia menengah dengan lampiran moral terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang lebih stabil, cenderung lebih mungkin untuk berpartisipasi dibandingkan kelompok usia lainnya.

2. Jenis Kelamin

Nilai panjang dominan dalam budaya berbagi bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya sebagai wanita adalah “di dapur” yang berarti bahwa di banyak masyarakat peran perempuan, terutama mengurus rumah tangga, tetapi nilai bagi peran perempuan telah bergeser oleh gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan, semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan salah satu syarat mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Memahami bahwa untuk berpartisipasi dalam kegiatan, harus didukung oleh suasana ekonomi yang stabil.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan Semakin lama masyarakat tinggal di lingkungan tertentu, akan mempengaruhi partisipasi seseorang. Rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasi besar dalam aktivitas apapun yang lingkungan.

1. 6. Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini ada beberapa dasar yang nantinya akan digunakan untuk memudahkan pembahasan penelitian yang akan dilaksanakan agar didapatkan hasil yang sebenar-benarnya. Untuk melihat operasionalisasi konsep dari sisi perencanaan partisipatif, maka teori yang akan digunakan adalah perencanaan berbasis partisipasi yang terdapat dalam konsep tipologi perencanaan pembangunan menurut A. Mappadjantji Amien (2005). Model ini menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 1.2
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Perencanaan Partisipatif	1. Pemberian Informasi	Menghadirkan Masyarakat
		Penyampaian Informasi
		Pengumpulan Informasi
	2. Penyaluran Aspirasi	Informasi Perencanaan Program
		Penyampaian kepada Pemerintah Desa
		Merumuskan Kebijakan Program Pembangunan

	3. Diversivitas Pengambilan Keputusan	Keikutsertaan Masyarakat
--	---------------------------------------	--------------------------

Sumber: diolah dari Amien (2005)

1. 7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian untuk mengungkapkan bagaimana manusia memaknai dan merasakan pengalaman-pengalamannya di dalam realitas kehidupan nyata dimana mereka berada. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah memahami realitas sosial dari individu atau kelompok berdasarkan *konteks* tertentu. Pada penelitian kualitatif, mutlak diperlukan adanya “*konteks*” bagi setiap tema yang sedang atau akan diteliti. Di dalam pandangan ontologis (hakikat), kenyataan (realitas) sosial adalah bukan sesuatu yang “tunggal”, melainkan majemuk yang mengandung beragam perspektif.

Realitas perencanaan partisipatif pembangunan talud di desa Lerep, dapat dipandang dari perspektif: prinsip, pendekatan, metode atau cara/teknik berpartisipasi di dalam kegiatan merencanakan proyek. Beragamnya perspektif dari realitas tersebut menjadi alasan mengapa “*konteks*” menjadi mutlak diperlukan agar tema pembicaraan menjadi terfokus pada suatu makna, arah, bentuk, konten, dan sasaran tertentu. Pada studi ini, tema dan sekaligus unit analisis adalah “perencanaan partisipatif”, dalam *konteks* “pembangunan talud penahan longsor”. Pembangunan talud menjadi *konteks* yang menentukan: makna, arah, bentuk, isi/konten, dan sasaran dari perencanaan partisipatif. Penekanan

atau fokus studi tertuju pada “partisipasi” warga terdampak pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan.

Menurut Roller (2018), penelitian kualitatif memiliki sejumlah atribut yang mencerminkan ciri-ciri dari riset kualitatif sebagai berikut:

1. Fenomena/kasus atau realitas yang diteliti dengan pendekatan kualitatif bersifat unik/spesifik. Realitas adalah tidak pernah bersifat tunggal, melainkan majemuk yang tergantung pada konteks pembicaraan.
2. Riset kualitatif mengungkapkan dan menjelaskan tentang makna dari fenomena atau realitas berdasarkan konteks tertentu.
3. Tidak ada kebenaran mutlak dalam riset kualitatif. Kebenaran yang ditemukan bersifat subyektif sebagai sintesis dari kebenaran menurut partisipan/informan (subjek penelitian), kebenaran menurut peneliti, dan fakta empiris di lapangan.
4. Hubungan antara peneliti dengan subjek yang diteliti (informan/partisipan) harus sedekat mungkin agar dapat mengungkapkan realitas yang tersembunyi.
5. Analisis pada riset kualitatif adalah tidak terstruktur karena datanya berupa narasi pendapat, pemikiran, pengetahuan, dan pengalaman yang dirasakan oleh subjek, baik dalam bentuk teks, ucapan, gambar/grafik, isyarat, rekaman, atau video.
6. Tipe isu/pertanyaan bersifat investigatif, yaitu pemeriksaan atau eksplorasi yang menuntut jawaban atau penjelasan secara mendalam

dan komprehensif yang seringkali diekspresikan dengan pertanyaan:

(1) Mengapa? ; atau (2) Bagaimana.....?

7. Rancangan atau desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat berubah setiap saat karena menyesuaikan dengan apa yang ditemukan di lapangan.
8. Riset kualitatif sangat membutuhkan ketrampilan (skill) peneliti agar dapat mengungkapkan relaitas yang tersembunyi.

Hubungan dari berbagai atribut riset kualitatif tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Atribut-atribut Riset Kualitatif



1.7.2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah daerah atau lokasi yang menjadi wilayah dimana situasi sosial tersebut terjadi. Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

1.7.3. Subjek Penelitian

Riset kualitatif meneliti tentang manusia dalam kaitannya dengan fenomena atau problem yang dihadapi. Fenomena merefleksikan

keterkaitan (implikasi) dengan berbagai realitas yang mendasari atau menjadi penyebabnya. Manusia adalah subjek yang kehidupan atau kegiatannya terkait dengan objek yang diteliti. Subjek penelitian pada studi ini adalah aktor/pelaku dan/atau *stakeholder* yang terlibat di dalam proses perencanaan partisipatif pembangunan talud di Desa Lerep.

Subjek yang diteliti dan sekaligus dijadikan sebagai informan di dalam studi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	STATUS INFORMAN
1	Sumariyadi, S.T	Kepala Desa Lerep
2	Sri Lestari, A.Md	Sekretaris Desa Lerep
3	Siti Hajjarwati	Kasie Kesejahteraan
4	Dwi Lestari	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Bapak Hasan	Ketua KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Daerah)
6	Bapak Daroji	Kepala Dusun Lerep
7	Ibu Anhar	Warga Desa Lerep
8	Bapak Agus	Warga Desa Lerep
9	Bapak Alim	Ketua Karangtaruna
10	Bapak Sholeh	Tokoh Agama

Sumber: Diolah dari data peneliti

1.7.4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan, peristiwa/kejadian, gejala, isu, atau masalah yang berkaitan atau terjadi di dalam kehidupan subjek yang

diteliti. Objek penelitian di dalam studi ini adalah “perencanaan partisipatif” dengan penekanan khusus pada partisipasi dari warga terdampak longsor dan/atau anggota masyarakat lainnya di desa Lerep pada proses perencanaan pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep.

1.7.5. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan di Desa Lerep, dengan menggunakan beberapa pertimbangan dalam perencanaan berbasis partisipatif, yang terdiri atas:

- a. Mengumpulkan informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi dari masyarakat tentang permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, yang diperlukan ialah menghadirkan sebanyak mungkin anggota masyarakat ataupun perwakilan dari masyarakat agar pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil dengan kata lain mengurangi ketidakpastian.
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan, mereka menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Penyaluran aspirasi masyarakat diperlukan bukan sekedar untuk memberikan “perasaan” kepada masyarakat bahwa keberadaan mereka diperhatikan, dengan demikian

maka akan mau ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan sebagaimana yang dianut sekarang.

- c. Diversivitas proses pengambilan keputusan. Keputusan pemerintah dalam perencanaan pembangunan memiliki perbedaan di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Apabila pada proses perencanaan terutama pada proses pelaksanaan musrenbang telah memenuhi ketiga aspek tersebut, berarti pemerintah telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah dengan model bottom up. Sebaliknya apabila dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak memenuhi tiga aspek dalam pendekatan perencanaan yang berbasis partisipasi tersebut diatas maka pemerintah tidak melaksanakan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat dan masyarakat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan serta lembaga perencanaan pembangunan hanya melaksanakan proses seremonial perencanaan pembangunan tanpa melihat substansi perencanaan pembangunan itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada perencanaan pembangunan talud penahan longsor tahun 2018 di wilayah rawan longsor di Desa Lerep.

1.7.6. Jenis dan Sumber Data

Hasil dari suatu penelitian ditentukan oleh ketersediaan, akurasi, dan kualitas data untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan pertanyaan dan konteks penelitian. Pada umumnya data pada riset

kualitatif adalah data yang tidak bisa diekspresikan secara numerik dalam bentuk angka-angka statistik, misalnya: konsep, pendapat, nilai-nilai, dan perilaku manusia dalam konteks sosial. Data kualitatif lazimnya berupa: (1) teks terstruktur (tulisan ilmiah berupa jurnal, makalah, artikel, cerita, komentar, buku, dll); (2) teks tidak terstruktur (transkrip, wawancara, percakapan, dll); (3) rekaman audio (rekaman wawancara, percakapan, dll); dan (4) rekaman video (grafik, seni, gambar, atau data visual lainnya).

Data adalah informasi yang berisi keterangan atau penjelasan mengenai keterkaitan antara subjek dengan objek yang diteliti. Berdasarkan sumber dan cara pengumpulannya, terdapat dua kategori data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau pun pihak yang berkepentingan dan dianggap paling mewakili (pihak pertama). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak-pihak yang terlibat dengan partisipasi pembangunan di Desa Lerep.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utamanya, tetapi diperoleh atau sudah dibuat lebih dulu oleh orang/pihak tertentu. Data sekunder berupa dokumen-dokumen notulensi usulan masyarakat desa, jurnal-jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, berita di media

cetak, media elektronik atau online. Data sekunder berguna untuk menunjang atau memperkuat argumentasi dari informan dan peneliti.

1.7.7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu: (1) Pengamatan (Observasi); (2) Wawancara (*In depth interview*); (3) Diskusi Kelompok Terfokus (*Focused Group Discussion/FGD*) (Ritchie & Lewis, 2003). Terdapat empat hal penting yang harus dipertimbangkan oleh peneliti ketika akan mengumpulkan data kualitatif, yaitu: (1) data dapat dipakai untuk mengidentifikasi konstruk atau konsep yang tepat; (2) bagaimana memilih teknik/metode pengumpulan data yang tepat; (3) mengembangkan alat bantu (*tool*) pengumpulan data yang tepat; dan (4) mengurangi risiko bias dan inkonsistensi diantara peneliti dan partisipan atau informan (Roller, 2018).

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data “wawancara secara mendalam (*in depth interview*)”. Data kualitatif yang dikumpulkan dari informan atau narasumber terpilih dengan memakai teknik wawancara secara mendalam (*in depth interview*) bertujuan mengungkapkan informasi yang terfokus pada lima aspek, yaitu: (1) pengalaman; (2) pendapat; (3) perasaan; (4) pengetahuan; dan (5) masukan atau input yang berkaitan dengan proses perencanaan partisipatif dalam proyek pembangunan talud di desa Lerep.

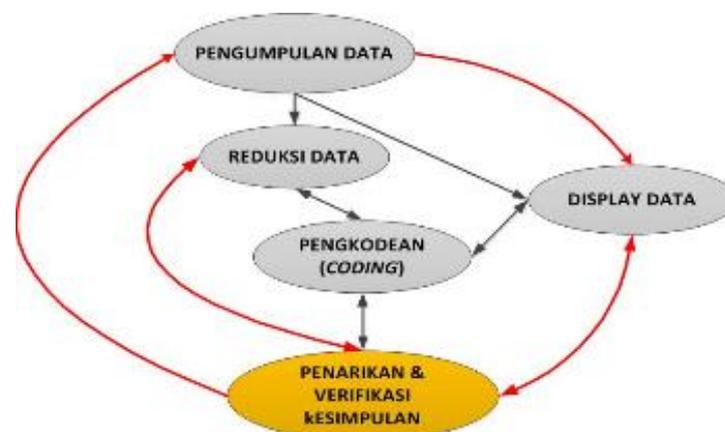
1.7.8. Analisis Dan Interpretasi Data

Riset kualitatif difokuskan pada studi mengenai perilaku dan kehidupan sosial manusia dalam tatanan alaminya (*natural setting*).

Realitas sosial adalah majemuk atau beragam serta bersifat subjektif. Pada satu realitas sosial yang sama dapat ditemukan beragam perspektif dan makna yang berbeda. Keragaman dan kompleksitas perspektif, makna, dan nilai yang terkandung di dalam suatu realitas sosial, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang juga kompleks dan beragam. Konsekuensinya, terdapat beragam teknik untuk menganalisis data kualitatif (Coffey & atkinson, 1996). Seringkali ditemukan interkoneksi, tumpang tindih (*overlapping*) atau saling melengkapi antara teknik yang satu dengan teknik lainnya (Miles & Huberman, 1994 dalam Creswell, 2007).

Logika utama yang dipakai pada riset kualitatif adalah induksi, dimana konsep dikembangkan secara induktif dari sejumlah indikator untuk membangun konsep. Proses analisis data diarahkan pada upaya untuk mengungkapkan hubungan dan interaksi diantara fenomena dengan realitas sosial yang melingkupinya. Menurut Miles & Huberman (1994), proses analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3
Proses Pengumpulan Data



Sumber: dimodifikasi dari Miles & Huberman (1994); Merriam (1998)